

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS  
TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**Ayu Citra Maharani, Muhammad Yusuf**

STIE Bank BPD Jateng

\*) email : mail2yus@gmail.com

**Abstract**

*This study aims to examine the effect of Corporate Governance and Profitability on Tax Avoidance in manufacturing companies in consumer goods industry sector that listed in Indonesia Stock Exchange. Proxy of Corporate Governance consist of Independent commissioners, Managerial Ownership, Audit Committee, and Quality Audit whereas Profitability used Return on Assets as proxied. Population in this study are manufacturing companies in consumer goods industry sector that listed in Indonesia Stock Exchange period 2015-2019 there are 53 companies. Purposive sampling used to sampel taking method and 23 was obtained. Multiple linear regression analysis is used for hypothesis testing. Based on the result data testing shows that Independent Comissioner have a positive and significant effect on Tax Avoidance. Return on Assets have a negative and significant effect on Tax Avoidance. Meanwhile, Managerial Ownership, Audit Committee, and Quality Audit have no signifificant effect on Tax Avoidance.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Corporate Governance, Profitabilty*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama bagi suatu negara untuk menunjang perekonomian negara, menggerakkan roda pemerintah, serta sebagai sumber dana untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Pajak adalah pungutan negara yang ditunjukkan bagi wajib pajak sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan demi mencapai kesejahteraan negara (Santoso, 2014). Di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut berita (tirto.id, 2020) target penerimaan pajak pada APBN 2020 sudah dilakukan 2 (dua) kali revisi, tetapi Menteri Keuangan RI tetap memperkirakan tidak tercapai karena melambatnya ekonomi. Berdasarkan data yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pada tahun 2015 realisasi penerimaan perpajakan hanya sebesar 83,29% dari target. Tiga tahun berikutnya realisasi penerimaan pajak juga masih belum bisa mencapai target. Data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2015 (cnbcindonesia, 2019). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 – 2019  
(Triliun Rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.489,3	1.539,2	1.283,6	1.424,0	1.577,6
Realisasi	1.240,4	1.285,0	1.151,0	1.315,9	1.332,1

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Tabel 2. *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2015-2020

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Tax Ratio</i>	11,6%	10,8%	10,7%	11,4%	11,1%

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Pada tahun 2015, *tax ratio* Indonesia sebesar 11,6%, kemudian turun menjadi 10,8% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, *tax ratio* kembali turun ke angka 10,7%. Pada tahun 2018, *tax ratio* naik ke angka 11,4% dan kembali turun ke angka 11,1% di tahun 2019. Pada tahun 2020, *tax ratio* tercatat berada di level 11,6%. Alat ukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total produk domestik bruto (PDB) dinamakan *tax ratio*. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dan menurunnya *tax ratio* tidak terlepas dari perilaku wajib pajak yang mencoba untuk mengurangi total beban pajak. Tujuan pemerintah dalam rangka memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak.

Bagi perusahaan, pajak bukan hanya salah satu tanggung jawabnya kepada pemerintah, tetapi juga menjadi beban bagi perusahaan. Terlebih lagi membayar pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung. Oleh karena itu, banyak masyarakat dan bahkan perusahaan melakukan pengelolaan pajak dengan baik agar pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah dapat berkurang. Manajemen pajak yang biasanya dilakukan adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), yaitu upaya mengurangi beban pajak yang tidak melanggar secara hukum peraturan perpajakan dengan cara mencari kelemahan dari peraturan itu sendiri (*loopholes*). Perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan praktik *Tax Avoidance*, karena unsur atau fakta yang dikenakan tidak selalu bisa dihindari (Dewi dan Jati, 2014) dalam (Saputra, Rifa, & Rahmawati, 2015).

Selain permasalahan diatas, fenomena *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia melibatkan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini dicurigai telah melakukan penghindaran pajak melalui anak perusahaan yang ada di Singapura pada tahun 2009-2017 menggunakan teori *transfer pricing*. LSM International Global Witness menerbitkan laporan pemeriksaan dugaan penyelewengan pajak perusahaan batu bara Adaro Energy. Pada laporan itu, perusahaan Adaro Energy diindikasikan melakukan penjualan batu bara dengan harga yang murah ke anak perusahaannya yang berada di Singapura untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Melalui perusahaan anak tersebut, ditemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai \$125 juta kepada pemerintah Indonesia (tirto.id, 2017).

Kasus penghindaran pajak lainnya melibatkan PT Bentoel International Investama. Perusahaan ini merupakan perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia. Menurut *Tax Justice Network*, Rabu tanggal 8 Mei 2019, penghindaran pajak telah dilakukan perusahaan rokok milik British American Tobacco (BAT) melalui PT Bentoel International Investama dengan cara mengambil banyak pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan Rothmans Far East BV yang ada di Belanda untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Rekening perusahaan Rothmans Far East BV menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari grup BAT lainnya yang berpusat di Inggris (Jersey). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Di Indonesia sendiri menerapkan kebijakan pemotongan pajak sebesar 20%, namun karena adanya perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Rencana tersebut mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar \$ 11 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

*Corporate Governance* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Maharani & Suardana (2014) menyatakan *Corporate Governance* (CG) adalah tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Praktik penghindaran pajak membuktikan bahwa CG belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan publik Indonesia. Sebagai tata kelola perusahaan, *Corporate Governance* merupakan penentu arah perusahaan berdasarkan karakter pemimpin perusahaan. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh karakter seorang pemimpin termasuk penghindaran pajak (Sri Mulyani, 2018).

Beberapa penelitian tentang *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Eksandy, (2017) dan Mappadang et al. (2018) menyatakan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan Maraya & Yendrawati (2016) dan Saputra et al. (2015) menyatakan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan. Mappadang et al. (2018) dan Maraya & Yendrawati (2016) menyatakan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, Sandy & Lukviarman (2015) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) menyatakan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan. Mulyani et al. (2018) menyatakan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan, Sandy & Lukviarman (2015) menyatakan Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan Oktamawati (2017) menyatakan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Khairunisa et al. (2017) dan Maraya & Yendrawati (2016) menyatakan Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan, Saputra et al. (2015) menyatakan bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Profitabilitas merupakan faktor lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. *Return on Assets* (ROA) menjadi salah satu rasio dari profitabilitas. Menurut Darmawan & Sukartha (2014) ROA merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Performa perusahaan dalam memperoleh laba bersih dapat dilihat dari nilai ROA yang tinggi. Semakin tinggi perusahaan memperoleh profitabilitas, maka semakin tinggi pula perusahaan harus membayar pajak. Hal tersebut mengakibatkan suatu perusahaan mencari celah untuk menekan biaya pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Saputra et al. (2015) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan.

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya mengenai faktor *Corporate Governance* dan Profitabilitas yang mempengaruhi praktik *Tax Avoidance*, penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor tersebut menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian. Alasan memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dikarenakan perusahaan yang ada dalam sektor ini cukup diminati oleh investor dan menjadi salah satu sektor usaha yang akan mengalami perkembangan secara terus-menerus dalam penjualannya. Hal tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi dan mengakibatkan pembayaran pajaknya juga akan semakin tinggi. Pembayaran pajak yang semakin tinggi akan membuat perusahaan cenderung melakukan penekanan pada pembayaran pajaknya dengan cara melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penelitian ini menambahkan variabel Kepemilikan Manajerial yang berpotensi mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan jangka waktu pengamatan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya agar diperoleh data yang lebih variatif sehingga dapat mewakili berbagai kondisi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (i) Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*? (ii) Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*? (iii) Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*? (iv) Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*? (v) Bagaimana pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*? (vi) Bagaimana pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance*?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. (ii) Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. (iii) Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. (iv) Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

(v) Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. (vi) Untuk mengetahui apakah ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis yaitu memberi pemahaman dan penjelasan tentang pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang berpotensi digunakan untuk melakukan praktik *Tax Avoidance*.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Agensi

Teori agensi atau teori keagenan merupakan teori yang mendeskripsikan hubungan antara *agent* sebagai pihak dalam manajemen perusahaan dan *principal* sebagai pemilik yang terikat dalam sebuah kontrak. *Principal* adalah pihak yang mengevaluasi informasi dan *agent* merupakan pihak yang melakukan aktivitas manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Sulistiono (2018) menyatakan konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan atau mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan.

Praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dalam perspektif teori agensi adalah adanya konflik kepentingan antara *agent* (wajib pajak/pembayar pajak) dan *principal* (pemerintah/pemungut pajak). Tujuan pemerintah sebagai pemungut pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah menginginkan adanya pemasukan yang besar dari sektor pajak guna menunjang perekonomian negara, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan beban pajak yang rendah/minimal. Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan pengelolaan pajak agar pajak yang dibayarkan dapat berkurang. Pengelolaan pajak yang biasanya dilakukan adalah penghindaran pajak.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Mappadang et al.(2018)	<i>The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange</i>	<i>Dependent variable: Tax Avoidance</i>  <i>Independent Variable: Good Corporate Governance (Board of Commissioner, Institutional Ownership)</i>	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Board of Commissioner</i> dan <i>Institutional Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Tandean & Winnie(2016)	<i>The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013</i>	<i>Dependent variable: Tax Avoidance</i>  <i>Independent variable: Good Corporate Governance (Executive Character, Executive Compensation, Company Size, Institutional Ownership, Proportion of BOC, Audit Committee, Audit</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, Kepemilikan Institusional, proporsi dewan komisaris, dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap

		<i>Quality</i> )	penghindaran pajak.	
3.	Saputra et al. (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di Bei	<i>Dependent variable: Tax Avoidance</i>  <i>Independent variable: Good Corporate Governance</i> (Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit). Profitabilitas (ROA, karakter eksekutif)	Hasil menunjukkan bahwa proporsi dewan, Kualitas Audit, dan audit komite tidak signifikan mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> . Sementara itu, <i>Return on Assets</i> dan karakter eksekutif signifikan mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> .
4.	Maraya & Yendrawati (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>corporate social responsibility disclosure</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> : studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO	<i>Dependent variable: Tax Avoidance</i>  <i>Independent variable: Good Corporate Governance</i> (Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial) <i>corporate social responsibility disclosure</i>	Hasil menunjukkan bahwa Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan proporsi Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial terbukti tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Adapun <i>corporate social responsibility disclosure</i> secara signifikan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , namun tidak didukung hipotesis.
5.	Mulyani et al. (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)	<i>Dependent variable: Tax Avoidance</i>  <i>Independent variable: Good Corporate Governance</i> (Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit).	Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Kualitas Audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6.	Khairunisa et al. (2017)	Kualitas Audit, <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Dependent variable: Tax Avoidance</i>  <i>Independent variable: Kualitas Audit corporate social responsibility</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Audit, <i>corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax</i>



			ukuran perusahaan	<i>Avoidance</i> . Secara parsial, Kualitas Audit dan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7.	Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	<p><i>Dependent variable:</i> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><i>Independent variable:</i> <i>Good Corporate Governance</i> (Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit).</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Secara simultan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).
8.	Payanti & Jati (2020)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	<p><i>Dependent variable:</i> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><i>Independent variable:</i> <i>corporate social responsibility</i> <i>Good Corporate Governance</i> (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, <i>Sales Growth</i>)</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dengan proksi yang terpilih mewakili adalah Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>sales growth</i> berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> .

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Dari perspektif teori agensi, perusahaan sebagai pembayar pajak memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemerintah sebagai pemungut pajak, sehingga mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak. Permasalahan keagenan ini dapat diatasi dengan diterapkannya *Corporate Governance* (CG). CG dalam hal ini berperan penting dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, demikian juga kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip CG di dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah Komisaris Independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajemen, sehingga dapat menekan praktik *Tax Avoidance* di perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Prakosa (2014) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) membuktikan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  = Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

### **2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan institusional merupakan mekanisme dari *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan antara perusahaan dengan pemerintah berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh lembaga domestik maupun asing. Kepemilikan institusional sangat penting karena dapat mengontrol pihak manajemen dengan melakukan pengawasan yang efektif. Dengan tingginya presentase Kepemilikan Institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajemen sehingga dapat meminimalkan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Avianita & Fitria, 2020).

Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) menunjukkan hasil Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *Tax Avoidance*. Artinya semakin tinggi persentase Kepemilikan Institusional maka semakin optimal pula tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga dapat mengurangi praktik *Tax Avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_2$  = Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

### **2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen sehingga pihak manajemen mempunyai kedudukan yang sama dengan pemegang saham. Kedudukan ini membuat manajer berperilaku sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan Manajerial dapat meningkatkan masalah keagenan antara perusahaan dengan pemerintah berkaitan dengan pajak. Semakin tinggi Kepemilikan Manajerial maka akan semakin tinggi pula *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini didasari oleh adanya tekanan dari pemegang saham untuk menghasilkan laba yang maksimal. Upaya untuk mendapatkan laba yang maksimal salah satunya dengan meminimalkan beban pajak yang dapat dilakukan dengan praktik *Tax Avoidance*. Hasil penelitian Avianita dan Fitria (2020) menunjukkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_3$  = Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

### **2.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Fungsi utama dari komite audit adalah *me-review* pengendalian internal, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Wulandari, 2007). Dengan adanya komite audit ini, mendorong manajer untuk mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, demikian juga kepatuhan dalam kewajiban perpajakan. Dengan demikian pembentukan komite audit merupakan cara untuk mengatasi masalah keagenan antara perusahaan dengan pemerintah berkaitan dengan praktik penghindaran pajak.

Menurut BEI Kep- 00001/BEI/01-2014 dan Bapepam-LK No. IX.1.5, setiap perusahaan yang terdaftar di BEI diwajibkan untuk mempunyai Komite Audit minimal tiga anggota. Dengan demikian, apabila komposisi dan jumlah Komite Audit pada suatu perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka fungsi pengawasan internal dapat berjalan efektif. Hasil penelitian yang dilakukan Eksandy (2017), Maharani dan Suardana (2014), Sandy dan

Lukviarman (2015) menunjukkan Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub> = Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

### **2.3.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance***

Pengaplikasian *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan membutuhkan adanya keterbukaan informasi. Terciptanya transparansi laporan keuangan dalam perusahaan tersebut dapat dicapai dengan melaporkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Diperlukan peran pihak ketiga yang independen sebagai perantara antara *agent* dan *principal*. Auditor merupakan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk menjadi perantara antara *agent* dan *principal*. Kualitas jasa audit berperan penting untuk mengurangi asimetri informasi dan *agency problems*. Semakin baik Kualitas Audit maka perusahaan tersebut semakin transparan dalam menyajikan suatu informasi.

Kualitas Audit yang baik dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut apakah diaudit oleh KAP *The Big Four* (Deloitte Touche Tohmatsu, PwC (*Pricewaterhouse Coopers*), Ernst & Young (EY) dan KPMG). Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dipercaya dapat menghasilkan Kualitas Audit yang baik dan transparan sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik *Tax Avoidance*. Pernyataan tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan Mulyani et al. (2018) bahwa Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>5</sub> = Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

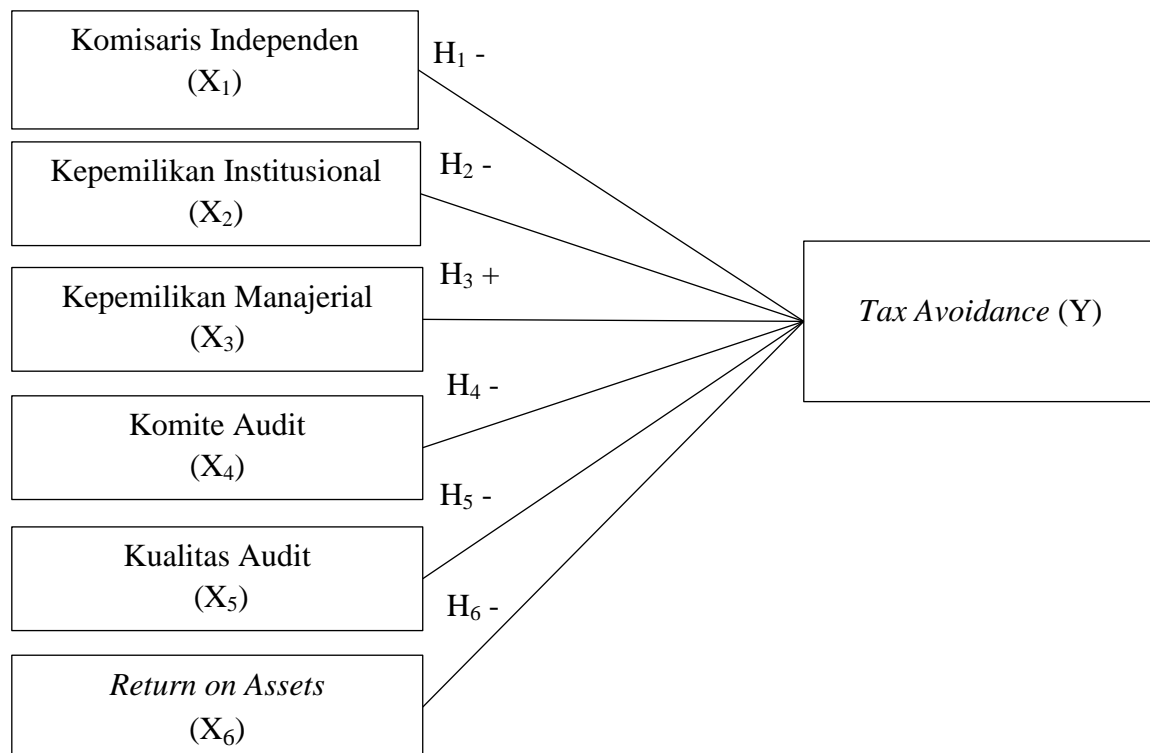
### **2.3.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

*Return on Assets* (ROA) merupakan indikator yang menunjukkan kinerja profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersihnya. Perusahaan yang memiliki laba tinggi dan berhasil membukukan laba yang terus meningkat akan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya *Tax Avoidance*. Menurut Maharani dan Suardana (2014) perusahaan yang memiliki nilai ROA yang tinggi dikatakan tidak melakukan penghindaran pajak karena mereka mampu mengatur pendapatan serta mampu membayar pajaknya. Penelitian Saputra et al. (2015) menunjukkan profitabilitas yang diprosikan oleh *Return on Assets* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>6</sub> = Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.



## 2.4 Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan wakil dari jumlah populasi tersebut. *Purposive sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Seleksi Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang konsisten terdaftar di BEI Tahun 2015-2019	53
2.	Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember periode 2015-2019	35
3.	Perusahaan yang mengalami laba selama periode 2015-2019	25
4.	Perusahaan memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk penelitian	23
	Perusahaan yang menjadi sampel penelitian	23
	Periode penelitian	5
Jumlah sampel selama periode penelitian		115

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Data tersebut diperoleh dari website perusahaan maupun website Bursa Efek Indonesia.

### 3.3 Variabel Penelitian

#### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau terikat dengan variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*. Penghindaran pajak yaitu upaya meminimalisasi beban pajak yang tidak melanggar secara hukum peraturan perpajakan dengan cara mencari kelemahan dari peraturan itu sendiri (loopholes). Usaha meminimalkan pajak secara eufimisme seringkali disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak biasanya mengacu pada proses merencanakan usaha serta transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang relatif rendah namun masih dalam peraturan perpajakan (Mulyani et al., 2018). Variabel *Tax Avoidance* diprosikan menggunakan rumus Cash ETR (*cash effective tax rate*). Semakin besar CETR, mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Mulyani et al., 2018).

$$CETR = \frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\% \quad (1)$$

#### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Governance* dan Profitabilitas.

##### 3.3.2.1 *Corporate Governance*

Menurut (Sutedi, 2012) *Corporate Governance* merupakan suatu proses yang digunakan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perusahaan agar tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan hukum dan nilai etika. *Corporate Governance* diyakini mampu meminimalkan taraf kecurangan serta penyimpangan yang dilakukan pihak agen. Dalam pengaplikasiannya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesejahteraan, serta keadilan merupakan prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance*. Pada penelitian ini proksi corporate governance terdiri dari Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Kualitas Audit.

##### a. Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan (Prakosa, 2014 dalam Mulyani, 2018). Komisaris Independen ditunjuk oleh pemegang saham minoritas serta bertanggung jawab sebagai pengawas kegiatan manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham minoritas guna menciptakan prinsip-prinsip *Corporate Governance* pada perusahaan (Avianita dan Fitria, 2020). Perhitungan Komisaris Independen menggunakan persentase jumlah Komisaris Independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \quad (2)$$

##### b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh lembaga domestik maupun asing. Dalam perusahaan, kepemilikan institusional bisa

dikatakan penting karena dapat mengontrol pihak manajemen dengan melakukan pengawasan yang baik sehingga dapat mengurangi tindakan manajer yang tidak menguntungkan bagi pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham institusional mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang lebih tentang pengelolaan perusahaan. Dengan demikian tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham dapat ditekan (Avianita dan Fitria, 2020). Kepemilikan Institusional diukur menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \quad (3)$$

#### c. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang berperan dalam mengelola perusahaan sehingga pihak manajemen memiliki kedudukan yang sama dengan pemegang saham. Peran kepemilikan manajerial dalam perusahaan yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen sebagai pemegang saham sekaligus mengelola perusahaan sebagai manajer (Avianita & Fitria, 2020). Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) Kepemilikan Manajemen dapat diukur menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \quad (4)$$

#### d. Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa Komite Audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit mempunyai tugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Menurut BEI Kep-00001/BEI/01-2014 dan Bapepam-LK No. IX.1.5, setiap perusahaan yang terdaftar di BEI diwajibkan untuk mempunyai Komite Audit minimal 3 anggota yang terdiri dari satu orang Komisaris Independen sebagai ketua dan dua orang pihak eksternal perusahaan sebagai anggota. Komite Audit dapat diukur dengan jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan dikali seratus persen (100%) (Saputra et al., 2015).

#### e. Kualitas Audit

Bagi perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik, audit memiliki peran yang sangat penting karena audit berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi. Kualitas Audit yaitu segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi dan melaporkannya ke dalam laporan keuangan auditan (Mulyani et al., 2018). Menurut Avianita dan Fitria (2020) Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* dapat dipercaya mampu menghasilkan Kualitas Audit yang baik sehingga dapat menaikkan tingkat transparansi dalam laporan keuangan. Transparansi berarti menyatakan nilai perusahaan yang sebenarnya, sehingga dapat menekan adanya kecurangan atau tindakan penyimpang manajemen yang bisa merugikan pemegang saham. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam *The Big Four* yaitu Deloitte, PwC (*Pricewaterhouse Cooper*), Ernst and Young (EY), dan KPMG. Kualitas Audit diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Pulik (KAP) *The Big Four* ditandai dengan angka 1, dan apabila tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Pulik (KAP) *Non The Big Four* ditandai dengan angka 0.

### 3.3.2.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba. *Return on Assets* (ROA) menjadi alat ukur dari profitabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini. Menurut Darmawan & Sukartha (2014) ROA merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. *Return on Assets* (ROA) yaitu ukuran keuntungan bersih yang didapat dari perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset. Semakin besar nilai ROA, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersihnya. Profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset pada akhir periode.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\% \quad (5)$$

## 3.4 Teknik Analisa Data

### 3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, deviasi standar, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali, 2013).

### 3.4.2 Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali, (2018) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

#### 3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antarvariabel bebas atau tidak (Ghozali, 2018). Terdapatnya multikolonieritas dapat diketahui dari nilai *tolerance* atau nilai VIF. Jika nilai *tolerance* > dari 0,10 atau nilai VIF < dari 10,00 maka tidak terdapat multikolonieritas.

#### 3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2018) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai signifikan hitungunya di atas 0,05 atau 5% yang berarti tidak mengandung heteroskedastisitas.

#### 3.4.2.4 Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan guna mengetahui ada atau tidaknya korelasi dari masing-masing variabel yang ada dalam suatu penelitian. Menurut Ghozali, (2018) model regresi yang baik yaitu regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*), dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai *Durbin-Watson* (*DW*). Apabila nilai  $du < dw < 4-du$  maka tidak terjadi autokorelasi

### 3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dipakai untuk menguji pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Adapun rumus regresi yang sesuai model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 - \beta_4 X_4 - \beta_5 X_5 - \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan CETR

$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_6$	=	Koefisien regresi parsial
$X_1$	=	Komisaris Independen
$X_2$	=	Kepemilikan Institusional
$X_3$	=	Kepemilikan Manajerial
$X_4$	=	Komite Audit
$X_5$	=	Kualitas Audit
$X_6$	=	Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA
$e$	=	Standar error (faktor pengganggu)

### 3.4.4 Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Uji koefisien determinasi / *adjusted r square* dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dilihat dari nilai *adjusted r square*, bila semakin besar nilai nya maka semakin besar pula pengaruh variabel dependen yang diberikan ke variabel independen. Adapun kelemahannya yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Tiap tambahan satu variabel independen maka *adjusted R square* meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

### 3.4.5 Uji Simultan (*F-test*)

Uji simultan dilakukan untuk mengukur seberapa jauh hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dilihat dari nilai signifikan F. Apabila nilai sig F < 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.4.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t (*t-test*).

#### 3.4.6.1 Uji Statistik t (*t-test*)

Uji statistik t (*t-test*) dilakukan untuk mengukur hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen dilakukan menggunakan uji regresi linier. Apabila nilai pada tabel signifikan  $\leq 0,05$  maka variabel independen secara parsial terdapat hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) yang diperoleh melalui *website* Bursa Efek Indonesia maupun *website* perusahaan. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019 menjadi objek dalam penelitian ini. *Purposive sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, diperoleh 23 perusahaan yang memenuhi kriteria. Jumlah observasi data yang diolah sebanyak 115 data.

### 4.2 Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif digunakan untuk memberitahukan informasi atau menjelaskan data yang dapat dilihat dari nilai minimum (*min*), maksimum (*max*), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian yang meliputi variabel dependen dan variabel independen. Berikut hasil analisis statistik deskriptif:



Tabel 5. Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
KI	115	33,33	80,00	43,0483	10,55485
KPI	115	0,00	92,66	71,1811	21,71176
KPM	115	0,00	45,00	4,7199	10,60787
Komite Audit	115	3	4	3,01	0,093
ROA	115	0,05	92,10	14,4288	12,94882
<i>Tax Avoidance</i>	115	7,13	76,36	28,1207	12,67460

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan uji statistik deskriptif tabel 4. dapat diketahui bahwa variabel Komisaris Independen (KI) memiliki nilai minimum sebesar 33,33 dan nilai maksimum sebesar 80,00. Nilai rata-rata dari Komisaris Independen (KI) sebesar 43,0483, lebih tinggi dari standar deviasinya yaitu sebesar 10,55485. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen (KI) memiliki simpangan data yang rendah selama periode penelitian. Variabel Kepemilikan Institusional (KPI) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 92,66. Nilai rata-rata dari Kepemilikan Institusional (KPI) sebesar 71,1811, lebih tinggi dari standar deviasinya yaitu 21,71176. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional (KPI) memiliki simpangan data yang rendah selama periode penelitian. Variabel Kepemilikan Manajerial (KPM) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 45,00. Nilai rata-rata dari Kepemilikan Manajerial (KPM) sebesar 4,7199, lebih rendah dari standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial (KPM) memiliki simpangan data yang tinggi selama periode penelitian. Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 4. Nilai rata-rata dari Komite Audit sebesar 3,01, lebih tinggi dari standar deviasinya yaitu sebesar 0,093. Hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki simpangan data yang rendah selama periode penelitian. Variabel *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,05 dan nilai maksimum sebesar 92,10. Nilai rata-rata dari *Return on Assets* (ROA) sebesar 14,4288, lebih tinggi dari standar deviasinya yaitu sebesar 12,94882. Hal ini menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) memiliki simpangan data yang rendah selama periode penelitian. Variabel *Tax Avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 7,13 dan nilai maksimum sebesar 76,36. Nilai rata-rata dari *Tax Avoidance* sebesar 28,1207, lebih tinggi dari standar deviasinya yaitu sebesar 12,67460. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* memiliki simpangan data yang rendah selama periode penelitian. Variabel Kualitas Audit merupakan variabel *dummy* sehingga menggunakan analisis statistik frekuensi, berikut adalah hasil analisis statistik frekuensi:

Tabel 6. Statistik Deskriptif Kualitas Audit

Keterangan	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>
KAP <i>Non Big Four</i>	52	45,2	45,2
KAP <i>The Big Four</i>	63	54,8	54,8
Total	115	100,0	100,0

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pada tabel 5 dapat diketahui bahwa KAP *Non Big Four* dengan nilai 0 sebanyak 52 perusahaan. Sedangkan KAP *The Big Four* dengan nilai 1 sebanyak 63 perusahaan. Sehingga dari total sampel sebanyak 115 perusahaan didapatkan persentase Kualitas Audit perusahaan sampel KAP *Non Big Four* sebesar 45,2% dan KAP *The Big Four* sebesar 54,8%.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel residual dalam penelitian ini terdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Menurut Ghozali (2018), variabel residual yang berdistribusi normal dilihat dari nilai signifikansi Monte Carlo. Uji normalitas akan terpenuhi atau dianggap lolos jika nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) di atas 0,05. Hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>			<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>			115
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>		0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>		11,58410554
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>		0,101
	<i>Positive</i>		0,101
	<i>Negative</i>		-0,046
<i>Test Statistic</i>			0,101
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>			0,006 <sup>c</sup>
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i>	<i>Sig.</i>		0,179 <sup>d</sup>
		<i>99% Lower</i>	
		<i>Confidence Bound</i>	0,169
		<i>Interval Upper Bound</i>	0,189

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6. hasil dari uji normalitas untuk *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* 115 sampel dapat diketahui bahwa nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,179 yang mana nilai tersebut lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Jika nilai *tolerance* > dari 0,10 atau nilai VIF < dari 10,00 maka tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
KI	0,830	1,205
KPI	0,382	2,618
KPM	0,324	3,082
Komite Audit	0,972	1,029
Kualitas Audit	0,617	1,620
ROA	0,700	1,428

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel 7. menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antarvariabel bebas. Dibuktikan dengan semua variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang

dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman's Rho, yaitu mengkorelasikan antara nilai absolut dari residual hasil regresi dengan seluruh variabel bebas (independen). Dengan ketentuan jika nilai signifikansi korelasi lebih < dari 0,05 maka telah terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Spearman's Rho dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Spearman's rho</i>		
KI	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,437
KPI	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,396
KPM	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,733
Komite Audit	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,765
Kualitas Audit	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,218
ROA	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,677

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 8. menunjukkan nilai signifikansi dari semua variabel bebas (independen) lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya korelasi dari masing-masing variabel yang ada dalam suatu penelitian. Pengujian autokorelasi antarvariabel dilakukan dengan melihat nilai dari *Durbin-Watson* dengan rumus  $DU < DW < 4-DU$ .

Tabel 10. Uji Autokorelasi Sebelum Transformasi

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the</i>	
			<i>Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
0,406 <sup>a</sup>	0,165	0,118	11,90154	0,905

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 9. dapat dilihat nilai *Durbin-Watson* adalah 0,905. Dengan jumlah variabel independen (k) sebanyak 6 variabel, jumlah observasi (n) sebanyak 115 dan dengan  $\alpha = 5\%$ , diperoleh nilai Durbin Upper (DU) sebesar 1,8068 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini mengalami autokorelasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah autokorelasi pada penelitian dapat diperbaiki menggunakan metode transformasi Cochrane Orcutt. Menurut Ghozali (2011) Cochrane Orcutt merupakan metode penyelesaian masalah autokorelasi dimana data penelitian ini ditransformasi kedalam bentuk lag. Berikut adalah hasil setelah dilakukan perbaikan autokorelasi menggunakan metode Cochrane Orcutt.

Tabel 11. Uji Autokorelasi Setelah Transformasi

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the</i>	
			<i>Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
0,377 <sup>a</sup>	0,142	0,094	9,82005	1,862

Sumber: Data diolah, 2021

Nilai *Durbin-Watson* pada tabel 10. Uji autokorelasi setelah dilakukan metode Cochrane Orcutt menunjukkan hasil sebesar 1,862. Dengan jumlah variabel independen (k) sebanyak 6 variabel, jumlah observasi (n) sebanyak 115 dan dengan  $\alpha = 5\%$ , didapatkan nilai

Durbin Upper (du) sebesar 1,8068. Sehingga diperoleh hasil  $1,8068 < 1,862 < 2,1932$ . Hal ini menunjukkan bahwa didalam model regresi tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian, metode Cochran Orcutt dapat memperbaiki masalah autokorelasi dalam penelitian ini. Pada variabel Kualitas Audit tidak dilakukan transform data karena merupakan variabel *dummy*.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan hasil analisis dari regresi linear berganda dalam penelitian ini:

Tabel 12. Analisis Regresi Linear Berganda

Keterangan	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	20,805	12,830		1,622	,108
Lag_KI	,380	,134	,273	2,846	,005
Lag_KPI	,001	,080	,001	,010	,992
Lag_KPM	,044	,170	,035	,258	,797
Lag_KomiteAudit	-9,657	9,072	-,100	-1,064	,290
KualitasAudit	-1,294	2,199	-,063	-,589	,557
Lag_ROA	-,236	,090	-,258	-2,638	,010

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil tabel 11. maka persamaan uji regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 20,805 + 0,380 (KI) + 0,001 (KPI) + 0,044 (KPM) - 9,657 (KomiteAudit) - 1,294 (KualitasAudit) - 0,236 (ROA) + e$$

#### 4.5 Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 13. Koefisien Determinasi

R Square	Adjusted R Square
0,142	0,094

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 12. diketahui nilai *adjusted R Square* sebesar 0,094. Hasil ini menjelaskan bahwa sebesar 9,4% variabel dependen (*Tax Avoidance*) dapat dijelaskan oleh variabel independen (Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Kualitas Audit, dan *Return on Assets*). Sedangkan sisanya sebesar 90,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.6 Uji Simultasn (F-test)

Uji simultan (*F-test*) bertujuan untuk mengetahui dugaan pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Ghozali (2011) menyatakan jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Uji F

Keterangan	F	Sig.
Regression	2,671	,019 <sup>b</sup>

Sumber: Data diolah, 2021

Pada hasil perhitungan didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2,671 dan nilai signifikansi sebesar 0,019. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Kualitas Audit, dan *Return on Assets* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

#### 4.7 Pengujian Hipotesis

##### 4.7.1 Uji Statistik t (t-test)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2011) jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 15. Uji t (t-test)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	20,805	12,830		1,622	,108
Lag_KI	,380	,134	,273	2,846	,005
Lag_KPI	,001	,080	,001	,010	,992
Lag_KPM	,044	,170	,035	,258	,797
Lag_KomiteAudit	-9,657	9,072	-,100	-1,064	,290
KualitasAudit	-1,294	2,199	-,063	-,589	,557
Lag_ROA	-,236	,090	-,258	-2,638	,010

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 14. dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a.  $H_1$  : Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.  
Berdasarkan tabel variabel Komisaris Independen (KI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Maka  $H_1$  tidak dapat diterima.
- b.  $H_2$  : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.  
Berdasarkan tabel variabel Kepemilikan Institusional (KPI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,992 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Maka  $H_2$  tidak dapat diterima.
- c.  $H_3$  : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.  
Berdasarkan tabel variabel Kepemilikan Manajerial (KPM) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,797 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, maka  $H_3$  tidak dapat diterima.
- d.  $H_4$  : Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.  
Berdasarkan tabel variabel Komite Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,290 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Maka  $H_4$  tidak dapat diterima.
- e.  $H_5$  : Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.  
Berdasarkan tabel variabel Kualitas Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,557 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Maka  $H_5$  tidak dapat diterima.
- f.  $H_6$  : Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.



Berdasarkan tabel variabel *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *Return on Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Maka  $H_6$  diterima.

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih < dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif, maka  $H_1$  tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hasil pengujian tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Jumlah Komisaris Independen yang sedikit menjadikan pengawasan kinerja manajemen yang dilakukan oleh Komisaris Independen tidak optimal. Pengawasan yang tidak optimal dapat membuat manajemen lebih leluasa mengambil suatu keputusan untuk kepentingannya sendiri sehingga hal tersebut dapat meningkatkan terjadinya praktik *Tax Avoidance*.

Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Eksandy (2017) dan Mappadang et al. (2018) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

### 4.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,992 lebih > dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif, maka  $H_2$  tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hasil pengujian tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Hasil ini berbeda dengan penelitian (Praditasari & Setiawan, 2017) yang menyatakan semakin tinggi presentase Kepemilikan Institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga dapat mengurangi praktik *Tax Avoidance*. Besar presentase Kepemilikan Institusional selama 5 tahun dalam penelitian ini berkisar 0% sampai dengan 92,66%, sehingga dapat dikatakan bahwa besar kecilnya Kepemilikan Institusional dalam suatu perusahaan maka perilaku penghindaran pajak bisa saja terjadi. Kepemilikan Institusional belum tentu dapat mengontrol manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Karena Kepemilikan Institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris dimana hal tersebut sudah menjadi tugasnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sandy & Lukviarman (2015) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) yang menyatakan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

### 4.6.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,797 lebih > dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif, maka  $H_3$  tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hasil pengujian tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Besar presentase Kepemilikan Manajerial selama 5 tahun dalam penelitian ini berkisar 0% sampai dengan 45,00%, dimana nilai maximum kurang dari 50% yang berarti presentase saham yang dimiliki oleh manajerial bersifat minoritas. Hal ini memungkinkan bahwa Kepemilikan Manajerial yang memiliki proporsi kecil tidak mempunyai wewenang yang besar dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo & Pramuka (2018) yang menyatakan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*,

namun berbeda dengan penelitian Avianita & Fitria (2020) yang menyatakan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

#### **4.6.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,290 lebih > dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif, maka  $H_4$  tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hasil pengujian tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Sedikit atau banyaknya jumlah Komite Audit tidak mempengaruhi tinggi rendahnya *Tax Avoidance*. Komite Audit dengan jumlah sedikit cenderung lebih efisien, namun ada kelemahan ide lebih sedikit, dan Komite Audit dengan jumlah lebih banyak juga memiliki kelemahan yaitu akan lebih banyak konflik pendapat diantara mereka, dengan demikian banyak sedikitnya Komite Audit tetap memiliki kelemahan sehingga tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Oktamawati, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktamawati (2017) yang menyatakan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, namun berbeda dengan penelitian Sandy & Lukviarman (2015) yang menyatakan Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

#### **4.6.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,557 lebih > dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif, maka  $H_5$  tidak dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hasil pengujian tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara perusahaan yang telah diaudit oleh KAP *The Big Four* maupun KAP *non Big Four* terhadap praktik *Tax Avoidance* didalam perusahaan. Idealnya semua KAP telah melakukan auditing sesuai dengan standar audit yang berlaku dan berpedoman pada standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI), sehingga dengan adanya tanggung jawab tersebut KAP akan tetap memberikan opini yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2015) yang menyatakan Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, namun bertentangan dengan penelitian Mulyani et al. (2018) yang menyatakan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

#### **4.6.6 Pengaruh *Return on Assets (ROA)* terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih < dari 0,05 dan nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif, maka  $H_6$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hasil pengujian sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. *Return on Assets (ROA)* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersihnya. Perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi diasumsikan dapat menghindari perilaku penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan serta mampu membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2015) yang menyatakan *Return on Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, *Return on Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

### 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi yaitu *Adjusted R Square* hanya sebesar 0,094 atau 9,4%. Sedangkan sisanya sebesar 90,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 5.3 Saran

Sehubungan dengan adanya keterbatasan tersebut maka penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan ataupun menambah variabel lain serta pengukuran yang relevan berkaitan dengan masalah penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Avianita, H., & Fitria, A. (2020). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–21.
- Bursa Efek Jakarta (BEJ). 2000, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep315/BEJ/06/2000, Jakarta.
- cnbcindonesia. (n.d.). *Miris! Ternyata Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik*. Retrieved November 8, 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik>
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Eksandy, A. (2017). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 : Update PLS Regresi. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. (*Edisi 5*). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (ke-9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. In (*Edisi 9*). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). KUALITAS AUDIT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Journal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(1), 36–43.
- Kontan.co.id. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.9(No.2), 525–539.
- Mappadang SE. MM, BKP, D. A., SE.Ak, MM, CA, P. D. T. W., & SE, SH, MM, A. M. W. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1066–1083. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p01>
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2017(1), 1229–1258.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014*.
- Prasetyo, I., & Pramuka, bambang A. (2018). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 1–15. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>

- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12.
- Sulistiono, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(1), 87–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i1.5009>
- Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor KEP-00001/BEI/01- 2014 Tahun 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Surat Keputusan Ketua Bapepam (Kep 41/PM/2003) tanggal 22 Desember 2003 pertauran no. IX.I.5.
- Sutedi, A. (2012). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>
- tirto.id. (n.d.). *Sri Mulyani Perkiraan Penerimaan Pajak APBN 2020 Tak Capai Target - Tirto.ID*. Retrieved November 8, 2020, from <https://tirto.id/sri-mulyani-perkiraan-penerimaan-pajak-apbn-2020-tak-capai-target-f2Y4>
- tirto.id. (2017). *DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy - Tirto.ID*. <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 699–728.
- Wulandari, E. R. (2007). Good Corporate Governance Konsep, Prinsip dan Praktik. *Jakarta: Lembaga Komisaris Dan Direktur Indonesia*.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)